



DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
KABUPATEN SAMBAS

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2026-2030



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2026 - 2030 dapat terselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2026 – 2030 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2026 – 2030.

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen perencanaan Dinas perpustakaan dan Kearsipan Daerah yang memuat strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pagu anggaran yang bersifat indikatif. Renstra ini selanjutnya menjadi pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan, dan pelaksanaan, pengendalian serta evaluasi program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah periode tahun 2026 - 2030.

Demikian dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas periode 2026 – 2030 disusun, semoga membawa manfaat dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan bagi Pemerintah Kabupaten Sambas khususnya dan bagi Pemerintah Republik Indonesia umumnya.

Sambas, 03 Februari 2026

Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas,



H. IZAMI, S.P.d., M.M.

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19700506 199803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH..... 9

2.1. Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

2.1.2. Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

2.1.4. Kelompok Sasaran

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah, Dukungan BUMD dan Kerja Sama (Apabila ada

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah.....

2.2.2. Penentuan Isu-isu Strategi

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah

3.3. Strategi

3.4. Arah Kebijakan

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....

4.1. Uraian Program

4.2. Uraian Kegiatan

4.3. Uraian Sub Kegiatan, beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam mendukung program prioritas Daerah/Pusat

4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra (IKU)

4.6. Target Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial pada suatu lingkungan wilayah/daerah untuk jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA), sedangkan Renstra disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

Untuk memastikan kesimbangan pembangunan daerah, pasca pemilihan kepala daerah serentak, maka pemerintah Kabupaten Sambas segera menyusun RPJMD dan Renstra PD sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Merujuk kepada instruksi tersebut, maka RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tanggal 27 November 2024. Dengan demikian RPJMD yang merupakan dokumen formal dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD.

Merujuk pada ketentuan di atas, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan sebagian urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib menyusun Renstra PD. Renstra PD dimaksud merupakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029. Dalam Renstra juga dijabarkan gambaran permasalahan yang dihadapi serta indikasi program dan kegiatan yang akan diimplementasikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD.



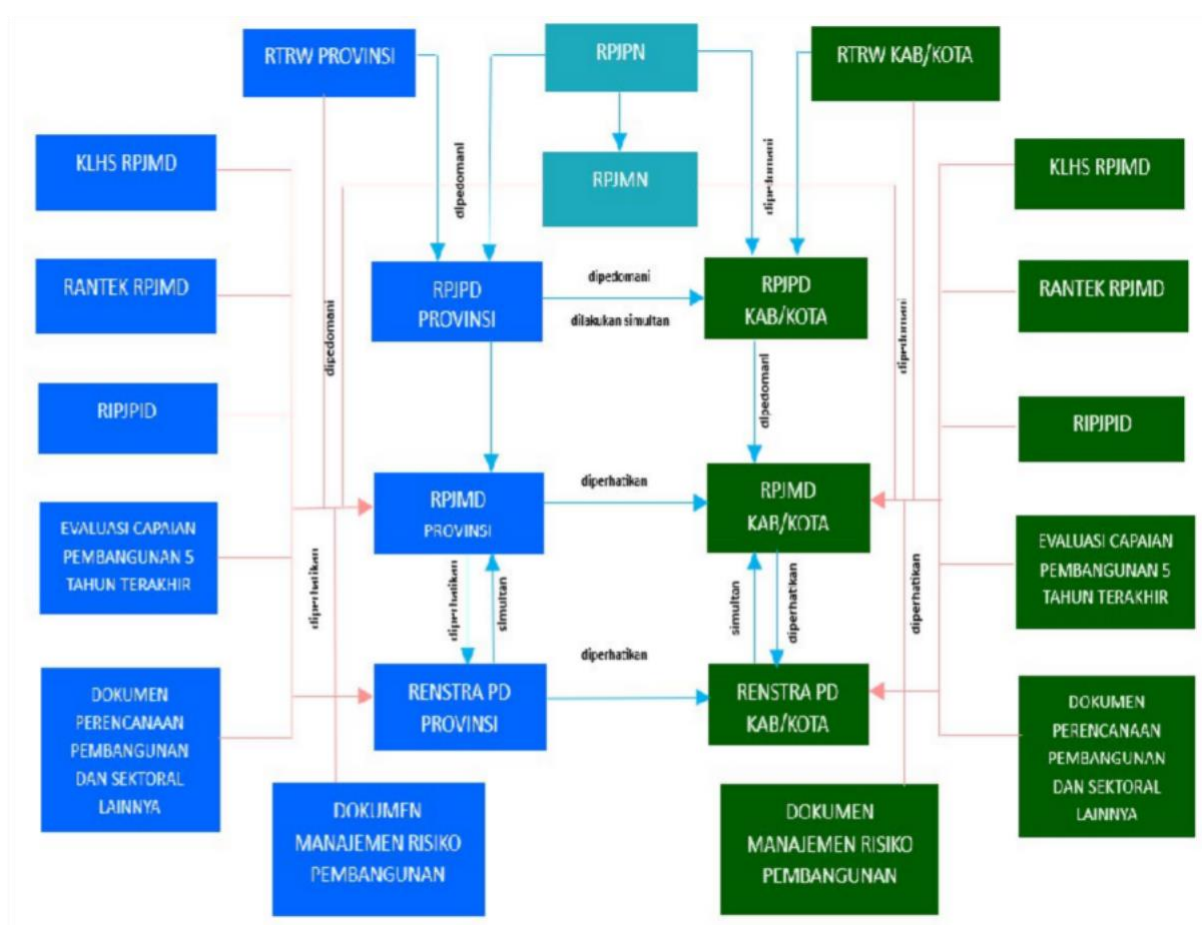
Renstra PD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas disusun sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan, serta bersifat indikatif. Penyusunan Renstra PD terdiri dari tahapan sebagai berikut:

- Persiapan penyusunan Renstra PD,
- Penyusunan rancangan awal Renstra PD,
- Penyusunan rancangan akhir Renstra PD dan
- Penetapan Renstra PD.

Tahapan tersebut dilaksanakan sejak dimulainya penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1.

Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya





1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunannya, Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas memperhatikan arah kebijakan dan berlandaskan pada perangkat hukum (dokumen-dokumen) yang berkaitan dengan perencanaan antara lain :

- 1) Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 2) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun



- 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 9) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 10) Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 129, tambahan lembaran Negara Nomor 4774).
 - 11) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, tambahan lembaran Negara Nomor 5071).
 - 12) Peraturan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286).
 - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531) ;
 - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 23) Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
- 24) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip;
- 25) Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);



- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah, Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25).
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 -2029;
- 29) Peraturan Bupati Sambas nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan secara operasional Tujuan, Sasaran dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029. Renstra juga merupakan penjabaran program dan kegiatan serta indikator pencapaian kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan yang harus diimplementasikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Bupati/Wakil Bupati Sambas ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029
2. Memberikan arahan bagi seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat.
3. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas dengan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas.
4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan.



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 – 2029 disusun berdasarkan sistematika sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Adapun sistematika dimaksud adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN;

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

- 2.1. Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
 - 2.1.2. Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
 - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
 - 2.1.4. Kelompok Sasaran
 - 2.1.5. Mitra Perangkat Daerah, Dukungan BUMD dan Kerja Sama (Apabila ada)
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah
 - 2.2.2. Penentuan Isu-isu Strategi

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah
- 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 3.3. Strategi
- 3.4. Arah Kebijakan



BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Uraian Program
- 4.2. Uraian Kegiatan
- 4.3. Uraian Sub Kegiatan, beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
- 4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam mendukung program prioritas Daerah/Pusat
- 4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra (IKU)
- 4.6. Taget Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sambas. Dalam kedudukannya sebagai sub sistem pada Tata Organisasi Pemerintah Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas, tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

2.1.1.1 Tugas Pokok

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 91 Tahun 2021, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas mempunyai tugas antara lain:

- a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan tugas Dekonsentrasi dan Tugas lainnya yang diserahkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



2.1.1.2 Fungsi

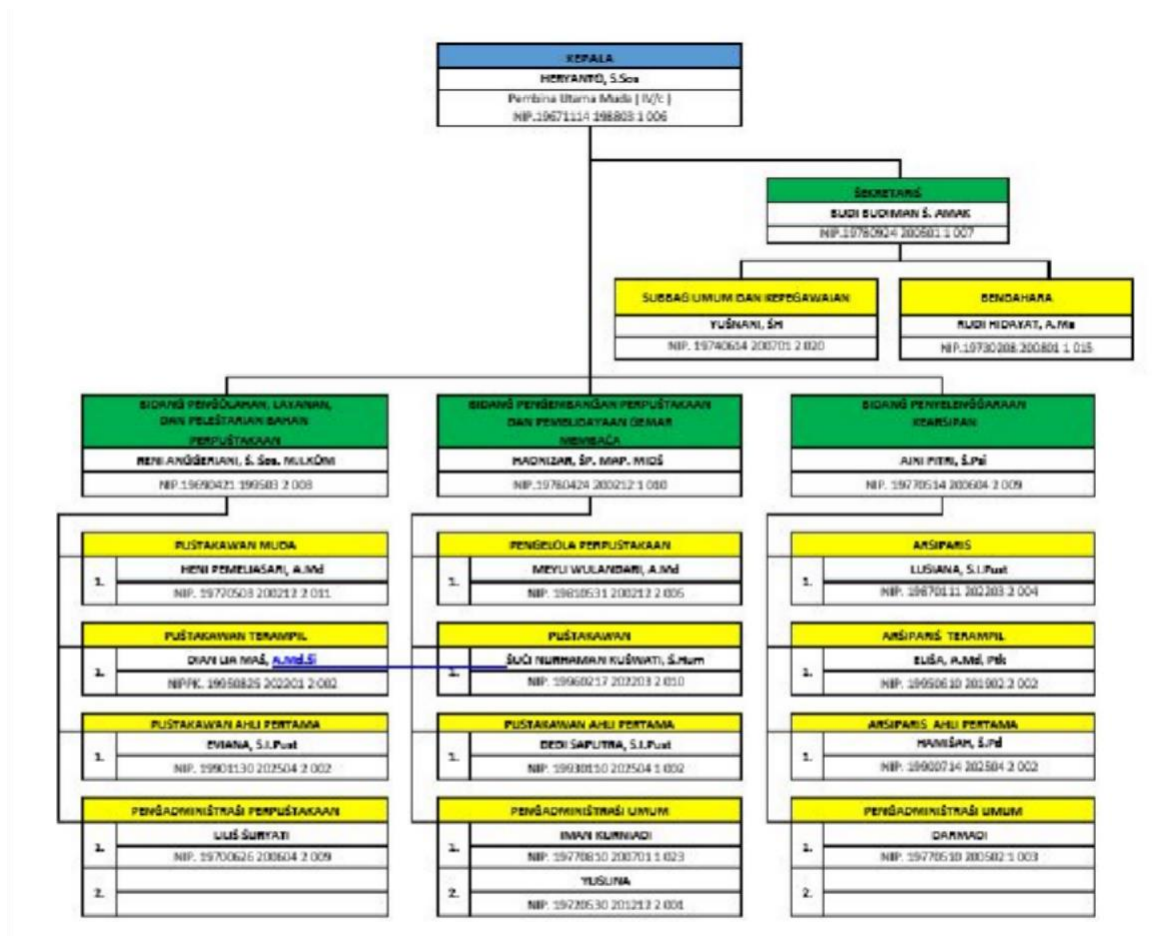
Dalam pelaksanaan Tugas Pokok sesuai lingkup kewenangannya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perpustakaan dan kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.1.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas perpustakaan dan kearah Daerah berdasar Peraturan Bupati Sambas Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas, Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat
- c. Bidang Pengolahan, Layanan, dan Pelestarian Bahan Perpustakaan.
- d. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca.
- e. Bidang Penyelenggaraan Kearsipan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



2.1.2. Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

2.1.2.1 Kepegawaian

Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas per bulan Juni tahun 2025 berjumlah 31 (tiga puluh s a t u) orang dengan rincian sebagai berikut ;

- ✓ PNS berjumlah 20 orang.
- ✓ ASN P3K berjumlah 1 orang
- ✓ Tenaga Honorer berjumlah 10 orang.

Tabel 1.1
Komposisi PNS dan PPPK berdasarkan
Golongan dan Jenis Kelamin
Tahun 2025



No.	Golongan	Jumlah	Jenis kelamin	
			L	P
1	I	-	-	-
2	II	2	-	2
3	III	14	5	9
4	IV	3	2	1
5	(P3K)	1	-	1
Jumlah		20	7	13

Tabel 1.2

Komposisi PNS dan P3K DPKD Kab. Sambas

Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Tahun 2024

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			L	P
1	S3	-	-	-
2	S2	3	1	2
3	S1	7	2	5
4	D IV	-	-	-
5	D III	6	2	4
6	D II	-	-	-
7	D I	-	-	-
8	SLTA	4	3	1
9	SLTP	-	-	-
10	SD	-	-	-
Jumlah		20	8	12

Sejalan dengan adanya perubahan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional pada eselon IV ke bawah, maka telah dilakukan penyesuaian jabatan ASN sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Berikut komposisi ASN berdasarkan jabatan sesuai struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas;



Tabel 1.3
Komposisi ASN Berdasarkan Jabatan
Tahun 2024

No.	Nama Jabatan	Jumlah
1	2	3
1.	Jabatan Struktural	
	a. Kepala Dinas	1 orang
	b. Sekretaris Dinas	1 orang
	c. Kepala Bidang	3 orang
	d. Kepala Sub Bagian	1 orang
2.	Jabatan Fungsional	
	a. Pustakawan muda	1 orang
	b. Pustakawan Trampil	1 orang
	c. Pustakawan	1 orang
	d. Pustakawan Ahli Pertama	2 orang
	e. Pengelola perpustakaan	1 orang
	f. Pengadministrasi Perpustakaan	1 orang
	g. Arsiparis	1 orang
	h. Arsiparis Trampil	1 orang
	i. Arsiparis Ahli Pertama	1 orang
	j. Bendahara	1 orang
	k. Pengadministrasi Umum	3 orang

Tenaga Honorer di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas berjumlah 10 orang. Penempatan tenaga honorer tersebut disesuaikan kebutuhan di masing-masing bidang pekerjaan. Berikut adalah penempatan tenaga honorer berdasarkan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya :

- | | |
|---|---------|
| a. Pengadministrasi Perpustakaan | 1 orang |
| b. Pengadministrasi perencanaan dan program | 1 orang |
| c. Pengadministrasi keuangan | 2 orang |
| d. Kebersihan dan keamanan | 2 orang |
| e. Prananata laboratorium kearsipan | 1 orang |



- | | |
|-----------------------------|---------|
| f. Pengelola perpustakaan | 1 orang |
| g. Penyusun bahan pembinaan | 1 orang |
| h. Analis kepegawaian | 1 orang |

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana.

Keadaan dan kondisi sarana dan prasarana yang tersedia dan dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 ini dapat gambarkan sebagai berikut ;

1. Tanah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas menempati areal seluas ± 9.326 M2, terletak di Dusun Suka Ramai Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas. Di atas tanah tersebut berdiri 2 buah bangunan yaitu gedung pelayanan perpustakaan dan gedung kantor. Selain itu juga terdapat garasi dan tempat parkir terbuka untuk masing-masing gedung.

2. Gedung.

Terhitung sejak bulan Juni tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas menempati 2 (dua) gedung yaitu ; gedung kantor dan gedung pelayanan perpustakaan.

- a. Gedung kantor dipergunakan untuk kegiatan administrasi perkantoran terdiri dari ; ruang Kepala Dinas, ruang Sekretariat, ruang Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca, ruang Bidang Penyelenggaraan Kearsipan dan ruang penyimpanan arsip.

Secara umum kondisi gedung dan ruang kerja cukup representatif setelah dilakukan renovasi pada tahun 2019.

b. Gedung Pelayanan Perpustakaan

Gedung pelayanan perpustakaan selesai dibangun pada akhir tahun 2021 dan mulai dioperasikan secara resmi sebagai gedung layanan perpustakaan sejak bulan Juni tahun 2022. Gedung tersebut terdiri dari 4 (empat) lantai dan dilengkapi dengan berbagai ruangan untuk keperluan layanan antara lain:

- Lantai 1 terdiri dari ; ruang server, ruang security, ruang menyusui, ruang disabilitas, ruang literasi lokal, ruang baca anak, ruang eksplorasi dan ruang deposit dan referensi.



- Lantai 2 terdiri dari ; ruang studio, ruang baca dan koleksi, ruang koleksi langka, ruang TIK, dan musholla.
- Lantai 3 terdiri dari ; Ruang Kepala Bidang Pengolahan, Pelayanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan dan ruang pengolahan.
- Lantai 4 Cafeteria

3. Jaringan Listrik, Air dan Telepon

Kapasitas daya jaringan listrik terpasang sebesar 49.500 VA yang disuplai dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan berlangganan. Demikian juga dengan kebutuhan air bersih disuplai dari PDAM Sambas dengan cara berlangganan. Untuk listrik dan air bersih saat ini sudah tercukupi dengan baik.

Untuk jaringan telepon seluler saat ini dirasa sudah cukup, namun untuk keperluan jaringan internet masih perlu untuk ditingkatkan. Mengingat saat ini sebagian pekerjaan sudah menggunakan aplikasi dengan sistem jaringan, sehingga diperlukan koneksi internet yang memadai. Selain itu untuk layanan perpustakaan digital juga diperlukan koneksi yang baik dan lancar. Jaringan internet yang terpasang saat ini sebesar 100 mbps, sehingga sering mengalami gangguan pada saat mengakses internet .

4. Garasi kendaraan.

Garasi kendaraan roda dua sudah tersedia 2 unit yang cukup untuk menampung sekitar 20 kendaraan bermotor roda dua. Sedangkan untuk Garasi kendaraan operasional perpustakaan keliling sebanyak 2 buah dan mobil dinas pejabat saat.

Selain itu, pembangunan garasi juga perlu dilakukan di halaman gedung pelayanan perpustakaan, hal ini guna menciptakan ketertiban dan memberikan kenyamanan bagi para pengunjung yang menggunakan kendaraan, khususnya kendaraan roda dua yang mana sebagian besar penggunaannya adalah pelajar dan mahasiswa.

5. Kendaraan Dinas Operasional.

Kendaraan dinas dan Operasional terdiri dari :

- | | |
|---|-----------|
| ➤ Kendaraan dinas Mobil Pejabat | : 2 buah |
| ➤ Kendaraan dinas Operasional Perpustakaan keliling | : 2 buah. |
| ➤ Kendaraan dinas Sepeda motor | : 9 unit. |



Kendaraan dinas mobil pejabat dan kendaraan operasional perpustakaan keliling saat ini relatif dalam kondisi baik dan dapat dioperasikan untuk menunjang kelancara pelaksanaan kegiatan. Sementara untuk kendaraan dinas sepeda motor tidak semua dalam kondisi baik dikarenakan usia kendaraan yang sudah tua.

6. Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Perlengkapan dan peralatan Kantor yang tersedia pada umumnya dalam kondisi baik dan dapat menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan, walau ada beberapa jenis peralatan yang perlu diperbaiki dan diganti komponennya. Namun demikian secara kuantitas masih perlu ditambah.

Perlengkapan dan peralatan Kantor yang masih perlu ditambah antara lain; kursi dan meja kerja untuk staf, lemari penyimpanan arsip/dokumen dan alat peraga atau peralatan untuk praktek ketrampilan melalui kegiatan inklusi sosial, Sementara perlengkapan dan peralatan kantor untuk menunjang keperluan penyelenggaraan pelayanan perpustakaan saat ini sudah cukup memadai. Tabel berikut adalah rincian peralatan dan perlengkapan untuk pelayanan perpustakaan yang ada saat ini;

Tabel 1.5
Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perpustakaan
Tahun 2024

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH
1	Rak Koleksi Umum	28
2	Rak Koleksi Referensi	5
3	Rak Koleksi Anak	11
4	Rak Koleksi Braille	2
5	Rak Koleksi Langka dan Muatan Lokal	2
6	Rak Display Buku	1
7	Rak display hasil kegiatan inklusi sosial	3
8	Rak Koran	2
9	Meja sirkulasi	2



10	Meja baca	25
11	Kursi baca	54

7. Peralatan kerja komputer.

Peralatan kerja berupa computer sudah menjadi kebutuhan yang mendesak, karena sebagai besar pekerjaan perlu dilakukan dengan komputer. Keberadaan komputer untuk sarana kerja relative masih belum mencukupi sesuai dengan jumlah personil yang ada.

Selain itu untuk keperluan Otomasi Pelayanan Perpustakaan peralatan komputer masih perlu untuk dilengkapi dan dipenuhi. Bukan hanya itu saja, sejalan dengan pengoperasian gedung baru yang sudah dilengkapi fasilitas yang cukup memadai untuk pelayanan perpustakaan perlu dilengkapi dengan peralatan multi media yang sesuai. Berikut komputer dan peralatan multimedia yang tersedia dalam menunjang pelayanan perpustakaan :

Tabel 1.6
Jenis Peralatan Multimedia
Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan
Tahun 2023

NO	JENIS MULTIMEDIA	JUMLAH
1	Komputer kerja	8
2	Komputer pemustaka	2
3	Laptop	1
4	Standing Kiosk	2
5	Scanner	1
6	Printer	3
7	Televisi	2
8	LCD studio	1
9	Speaker	8
10	Video Processor	1

b. Peralatan dan Mesin.

Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia dalam mendukung



pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 1.7
Daftar Nama Peralatan dan Mesin

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1		
	Station	
Wagon	2	buah
2	Mobil Unit Perpustakaan Keliling	2 buah

	3	Sepeda Motor 9 buah
	4	SpeedBoat /Motor Tempel Yamaha 15 P K 1 buah
	5	Mesin Tik manual Longawagen (18..) 1 buah
	6	Lemari Kayu 2 buah
	7	Lemari Besi/metal 6 buah
	8	Rak Besi 33 buah
	9	Filling Kabinet Besi 3 buah
	10	Locker 1 buah
	11	Lemari Katalog 1 buah

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Rencana Strategis
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Kabupaten Sambas

Capaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas

NO	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	SPM/ Standarr Nasional	IKK	TARGET KINERJA			REALISASI CAPAIAN			CATATAN ANALISIS
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
	Indek Kinerja Daerah									
1	Indeks Pembangunan Literasi		Nilai Indeks pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	35	36	37	35	71,42	74,25	IKD
2	Tingkat Pengelolaan Arsip		Nilai Indeks Penyelenggaraan Kearsipan yang didapatkan dengan metode survey dengan mengukur sejumlah unsur Penyelenggaraan Kearsipan	56	61	65	56	62,3	71,32	IKD



Rencana Strategis

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Kabupaten Sambas

Indek Kinerja Utama										
3	Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk	3	Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk	10,36	10,37	14,00	100,58	10,9		Renstra OPD 2022-2026
4	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	4	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	62,9	52	53	123,33	55,41		Renstra OPD 2022-2026
5	Jumlah Arsip Terjaga dan Arsip Statis Sebagai Warisan Budaya Yang Dipreservasi	5	Jumlah Arsip Terjaga dan Arsip Statis Sebagai Warisan Budaya Yang Dipreservasi	1,422	460	690	0,62	653		Renstra OPD 2021-2026
6	Nilai hasil Pengawasan Kearsipan	6	Nilai hasil Pengawasan Kearsipan		61	65		62,3		Renstra OPD 2021-2026



2.1.4. Kelompok Sasaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sambas memberikan sasaran layanan yang dapat kami klasifikasikan berdasarkan urusannya, sebagai berikut:

1. Sasaran Layanan Bidang Perpustakaan kepada:
 - a. Masyarakat/pemustaka baik yang datang ke perpustakaan umum daerah maupun ke desa-desa/sekolah yang diberikan layanan dengan mobil perpustakaan keliling.
 - b. Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Perguruan Tinggi, perpustakaan Khusus/perpustakaan pondok pesantren, Perpustakaan Desa.
2. Sasaran Layanan Bidang kearsipan kepada
 - a. Masyarakat yang memerlukan arsip dapat meminjam dan melihatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kecamatan, Desa/kelurahan, BUMD.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah, Dukungan BUMD dan Kerja Sama

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas sebagai instansi teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Perpustakaan dan Kearsipan mengalami permasalahan-permasalahan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut antara lain :

1. Sarana dan Prasarana.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang masih perlu ditingkatkan khususnya untuk sarana penyimpanan Arsip. Kebutuhan Depo arsip yang representative sangat diperlukan guna mendukung kegiatan pengamanan dan penyimpanan arsip yang baik. Sarana peralatan kerja seperti peralatan computer dan meja kursi kerja masih perlu ditingkatkan. Begitu juga dengan kebutuhan perabot dan peralatan penyelenggaraan pelayanan Perpustakaan masih perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.



2. Sumber Daya Manusia pengelola Perpustakaan dan Kearsipan yang mempunyai spesifikasi keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan relative masih sedikit sekali.
3. Budaya Minat baca buku masyarakat yang masih rendah.
4. Perpustakaan yang tersedia belum secara optimal berfungsi sebagai pusat ilmu pengetahuan Masyarakat .
5. Sistem Pengelolaan Arsip daerah di lingkungan instansi pemerintah Daerah dan Desa relative belum terlaksana dengan baik.
6. Sistem pengamanan Arsip dokumen Aset kekayaan Pemerintah Daerah belum tertata dengan baik.
7. Tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat serta aparatur penyelenggara pemerintahan akan pentingnya arsip bagi kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara masih rendah
8. Teknologi Informasi belum dimanfaatkan secara maksimal dalam rangka memodernisasi dalam pelayanan maupun pelaksanaan tugas di bidang Perpustakaan dan Kearsipan daerah

2.2.2. Penentuan Isu-isu Strategi

Berdasarkan berbagai identifikasi permasalahan dan hasil telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut ;



Tabel 1.9
Penentuan Isu-isu Strategi

A	Urusan Perpustakaan
1	Jumlah Pengelolaan Perpustakaan yang mempunyai kompetensi belum memadai
2	Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana untuk membaca buku dan menambah pengetahuan
4	Belum optimalnya layanan perpustakaan keliling dalam menjangkau lapisan masyarakat yang membutuhkan
5	Belum adanya Regulasi Daerah yang mengatur di bidang Perpustakaan daerah.
B	Urusan Kearsipan
1	Masih Belum optimalnya kemampuan maupun jumlah SDM pengelola Kearsipan (Kab. Sambas baru memiliki 3 orang jafung Arsiparis)
2	Belum adanya Regulasi Pemerintah Daerah mengenai standar Pengelolaan Arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten
3	Sarana dan prasarana pendukung untuk penyimpanan dan pengamanan Arsip daerah belum terpenuhi
4	Pengelolaan Arsip belum dilakukan secara terintegrasi dan sistematis dalam satu kesatuan sistem pengelolaan arsip daerah
5	Masih rendahnya atensi OPD terhadap penyelenggaraan kearsipan dilingkungannya.

1. Urusan Perpustakaan

Pengelolaan perpustakaan di Kabupaten Sambas pada periode sebelumnya masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu menjadi fokus perhatian dalam Renstra 2025–2029. Jumlah pengelola perpustakaan yang memiliki kompetensi memadai masih belum mencukupi, sehingga kualitas layanan dan inovasi program perpustakaan belum optimal. Berdasarkan data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Kabupaten Sambas Tahun 2024, rasio tenaga perpustakaan bersertifikat terhadap jumlah unit layanan perpustakaan masih di bawah standar nasional.

Kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana membaca dan menambah pengetahuan juga masih rendah, yang tercermin dari rendahnya tingkat kunjungan perpustakaan. Layanan perpustakaan keliling yang seharusnya menjangkau masyarakat di wilayah terpencil belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan armada dan SDM pendukung. Selain itu, belum adanya regulasi daerah yang mengatur penyelenggaraan perpustakaan menyebabkan kebijakan di bidang ini belum memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga upaya peningkatan layanan dan fasilitas menjadi kurang terarah.

2. Urusan Kearsipan

Pengelolaan kearsipan di Kabupaten Sambas juga masih menghadapi kendala signifikan. Kemampuan dan jumlah SDM pengelola arsip masih terbatas, di mana saat ini hanya terdapat 3 orang pejabat fungsional arsiparis. Regulasi Pemerintah Daerah yang mengatur standar pengelolaan arsip belum tersedia, sehingga praktik pengelolaan arsip antar perangkat daerah belum seragam dan belum memenuhi prinsip-prinsip kearsipan nasional.

Sarana dan prasarana pendukung, khususnya untuk penyimpanan dan pengamanan arsip, belum terpenuhi secara memadai. Pengelolaan arsip juga belum dilakukan secara terintegrasi dan sistematis dalam satu kesatuan sistem pengelolaan arsip daerah. Selain itu, perhatian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap penyelenggaraan kearsipan masih rendah, sehingga banyak arsip yang belum dikelola sesuai ketentuan.

**BAB III****TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah**

Untuk menetapkan visi lima tahun ke depan, Kabupaten Sambas menggunakan jargon “Sambas Berkah Berkemajuan”. **Berkah** merupakan akrononim **Bersama Kuatkan Langkah**, dengan filosofi yang menunjukkan pada langkah **Bersinergi, Kompetitif, Amanah dan Harmonis**. Sedangkan **Berkemajuan** merupakan singkatan dari **Beriman Kepada Allah SWT, Kemandirian, Maju, Berkelanjutan**. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Visi Kabupaten Sambas tahun 2025-2029 adalah :

“ Bersama Kuatkan Langkah Dengan Bersinergi, Kompetitif, Amanah dan Harmonis Mewujudkan Sambas Yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”

Makna filosofi pernyataan visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam wujud 5 (lima) misi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Salah satu misinya adalah (M.2) “ Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing “. Tolok ukur misi ini mencakup Indeks Pembangunan Manusia dengan salah satu sasarnya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas literasi masyarakat.

Berdasarkan rumusan visi dan misi di atas, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai hingga 5 (lima) tahun ke depan khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan yaitu :

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Visi : Bersama Kuatkan Langkah Dengan Bersinergi, Kompetitif, Amanah dan Harmonis Mewujudkan Sambas Yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan			
M2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	T2.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia
		S.2.1.4 Meningkatkan kualitas dan kuantitas literasi	Indeks Pembangunan Literasi masyarakat



		Masyarakat	
		5.2.1.5 Meningkatkan Manajemen Kearsipan	Indeks hasil pengawasan kearsipan pada lingkup pemerintahan daerah

Sesuai tugas pokok dan fungsi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu urusan perpustakaan dan urusan Kearsipan. Kedua urusan tersebut merupakan pelaksanaan dari misi ke 2 dalam RPJMD Kabupaten Sambas 2025-2029. Berdasarkan misi yang diampu, maka tujuan strategis perangkat daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas, dapat dirumuskan sebagai berikut :

Tujuan	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis Perangkat Daerah
Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan melalui Budaya Literasi Masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Peningkatan kualitas dan kuantitas literasi Masyarakat
	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Peningkatan Manajemen Kearsipan

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan melalui Budaya Literasi Masyarakat	Peningkatan kualitas dan kuantitas literasi Masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat
	Peningkatan Manajemen Kearsipan	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan DaerahKetersediaan Arsip

3.3. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari misi yang telah ditetapkan. Strategi dirumuskan sebagai langkah yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran. Selanjutnya strategi tersebut



ditindaklanjuti dengan kebijakan sebagai arah tindakan dan cara yang diambil untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada misi yang diemban sehingga visi Bupati dan wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 dapat diwujudkan.

Adapun strategi dan kebijakan yang ditentukan untuk melaksanakan sejumlah misi Kepala Daerah yang telah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sambas 2025 – 2029 dalam lingkup kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut:

1. Strategi Pertama, **Meningkatkan Tata Kelola perpustakaan yang mampu mendorong budaya Gemar membaca masyarakat**

Strategi tersebut mempunyai **kebijakan** sebagai berikut:

- a. Menyediakan koleksi bahan pustaka yang relatif lengkap.
- b. Menyediakan sarana dan prasarana baca yang nyaman dan representative.
- c. Meningkatkan peran perpustakaan dalam mendorong dan menumbuhkan kembangkan minat baca masyarakat.
- d. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola Perpustakaan.

2. Strategi kedua, **Mewujudkan pengelolaan Kearsipan daerah yang mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.**

Strategi tersebut mempunyai **kebijakan** sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Data dan pelayanan informasi Kearsipan.
- b. Meningkatkan pengamanan dan kelestarian arsip.

Misi (2) : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Strategi : Peningkatan Tata Kelola Kearsipan yang mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kebijakan : Meningkatkan budaya literasi masyarakat

Meningkatkan tata kelola kearsipan dan pengelola arsip

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan

Program – program pendukung ;

1. Program Pengelolaan Arsip.
2. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.



3. Program Perizinan Penggunaan Arsip.

Strategi : Peningkatan Pembangunan Literasi Masyarakat yang mampu mendorong budaya Gemar membaca masyarakat.

Kebijakan : Meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat

Program – program pendukung ;

1. Program Pembinaan Perpustakaan.
2. Program Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno

3.4. Arah Kebijakan

3.4.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

1. Perpustakaan.

Perpustakaan masuk dalam Program Prioritas Nasional dalam literasi dan pembangunan sosial ekonomi melalui program perpustakaan berbasis inklusi sosial. Melalui kebijakan tersebut, perpustakaan harus menjalankan fungsinya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Berkaitan hal tersebut, maka dalam penyusunan program dan kegiatan bidang perpustakaan di Daerah telah diterbitkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Program dan Kegiatan Bidang Perpustakaan Lingkup Pemerintah Daerah. Program dan kegiatan bidang Perpustakaan mencakup penyelenggaraan semua fungsi Perpustakaan yang meliputi semua kewenangan penyelenggaraan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang didanai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Program dan kegiatan bidang Perpustakaan dimaksud mencakup:

- a. pengembangan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
- b. pembudayaan gemar membaca pada satuan pendidikan, keluarga dan Masyarakat.
- c. pelestarian dan pengembangan warisan dokumenter budaya bangsa baik dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.

2 Kearsipan



Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan dibidang kearsipan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA). Tujuan dari GNSTA antara lain mendorong lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk mewujudkan tertib:

- a. Penyusun dan melaksanakan kebijakan kearsipan secara berkesinambungan;
- b. Pembentukan Organisasi Kearsipan Yang Mampu Menjalankan Tugas Dan Fungsi Secara Efisien Dan Efektif;
- c. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kearsipan Secara Optimal;
- d. Pengelolaan prasarana dan sarana kearsipan sesuai dengan standar kearsipan;
- e. Pelaksanaan Pengelolaan arsip secara komprehensif dan terpadu; dan
- f. Penyediaan dan penggunaan dana kearsipan secara efektif dan efisien.

Sasaran GNSTA meliputi tertib kebijakan kearsipan, tertib organisasi kearsipan, tertib sumber daya manusia kearsipan, tertib prasarana dan sarana, tertib pengelolaan arsip dan tertib pendanaan kearsipan pada lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah.

**BAB IV****RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN****4.1. Uraian Program**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas telah menyusun program, kegiatan, dan sub-kegiatan strategis sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan. Rencana ini mencerminkan komitmen terhadap peningkatan layanan publik, penguatan tata kelola, serta pengembangan literasi dan pelestarian warisan budaya daerah.

Urusan / Bidang	Program	Indikator Program
1	2	3
Urusan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah Koleksi Naskah Kuno Yang Dimiliki Perpustakaan Daerah
Urusan Kearsipan	Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip
	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Jumlah Arsip yang dilakukan evakuasi, identifikasi, pemulihan dan penyimpanan akibat bencana
	Perizinan Penggunaan Arsip	Jumlah SOP Penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disusun dan ditetapkan

4.2. Uraian Kegiatan**4.2.1. Urusan Perpustakaan**

Terdiri dari 1 Program Penunjang urusan pemerintahan dan 3 Program utama dalam urusan ini adalah:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan, mendukung kelancaran operasional SKPD dengan kegiatan perencanaan, penganggaran, kepegawaian, keuangan, serta pengadaan sarana dan prasarana.



- b. Program Pembinaan Perpustakaan, yang bertujuan meningkatkan indeks kegemaran membaca masyarakat melalui pembinaan dan pengembangan perpustakaan pada satuan pendidikan, perpustakaan umum, serta perpustakaan elektronik.
- c. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, difokuskan pada pelestarian naskah kuno, pengembangan koleksi budaya etnis nusantara, dan pelibatan masyarakat dalam konservasi koleksi lokal.

Indikator keberhasilan program ini diukur melalui:

- a. Persentase perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP)
- b. Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan,
- c. Jumlah koleksi naskah kuno yang dilestarikan, dan
- d. Nilai indeks kegemaran membaca masyarakat.

4.2.2. Urusan Kearsipan

Terdiri dari tiga program utama:

- Program Pengelolaan Arsip, mencakup pengelolaan arsip dinamis dan statis, penyusunan daftar arsip, serta pemanfaatan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN dan JIKN).
- Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, berfokus pada evakuasi, identifikasi, pemulihan, dan penyimpanan arsip pasca bencana atau penggabungan/ pembubaran perangkat daerah.
- Program Perizinan Penggunaan Arsip, menyusun dan menetapkan SOP penggunaan arsip tertutup serta pemberian izin akses arsip.



	BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT
	(1)	(2)
	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat
	Pengelolaan perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan
	Pengembangan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah Kabupaten / Kota sesuai standar nasional perpustakaan di wilayah kabupaten/kota sesuai kewenangan
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat daerah kabupaten / kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi
	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan kabupaten/kota
	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat
	Kerjasama Peningkatan kegemaran Membaca dan Literasi	jumlah kerjasama peningkatan kegemaran membaca dan literasi



Rencana Strategis

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah data dan informasi perpustakaan
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasyarakatan Gemar Membaca di Masyarakat
Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya
Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat



PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		Jumlah Naskah kuno yang dilestarikan
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah kabupaten / Kota	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Jumlah Masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno
	Pengembangan, pengolahan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah naskah kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan
	Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)
	Seleksi dan pengadaan koleksi budaya etnis nusantara	jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh perpustakaan daerah tingkat Kabupaten/Kota
	Pengolahan dan penyiangan koleksi budaya etnis nusantara	jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh perpustakaan daerah tingkat Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Tingkat ketersediaan arsip
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip
		Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah OPD yang menyampaikan daftar Arsip dinamis.
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah OPD yang melaksanakan pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis Inaktif



	Pengasawan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten	<i>Kabupaten Sambas</i> Jumlah OPD yang dilakukan pengawasan Internal Kearsipan
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik
	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang disampaikan kepada ANRI
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip statis pada Organisasi perangkat daerah yang diakuisisi, dan dilakukan preservasi.
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah aplikasi yang disediakan untuk penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan per tahun
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah Arsip yang dilakukan evakuasi, identifikasi, pemulihan dan penyimpanan akibat bencana
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK (ITEM)
	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Dokumen hasil penilaian dan penetapan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun



	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun
	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK
	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana		Jumlah Arsip yang dievakuasi i dan Identifikasi Akibat Bencana
	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana		Arsip Akibat Bencana yang berhasil dipulihkan dan disimpan.
	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten /Kota yang Digabung dan /atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa /Kelurahan		Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK
	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten /Kota		Dokumen Data Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota karena Penggabungan.
	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten /Kota		Dokumen Data Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota karena Pembubaran
	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan		Dokumen Data Arsip Kecamatan yang dimekarkan
	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan		Dokumen Data Arsip Desa yang dimekarkan
	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten yang sesuai NSPK



	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kabupaten Sambas Dokumen Daftar Arsip Statis Otentik berdasarkan penilaian dan penetapan autentisitas
	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Daftar Arsip hasil alihmedia berdasarkan penilaian dan penetapan.
	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK
	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Dokumen penilaian dan penetapan arsip sytatis yang hilang
	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Dokumen Evaluasi dan penetapan hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang
	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Dokumen Penetapan dan pengumuman Daftar Pencarian Arsip.
	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah SOP Penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disusun dan ditetapkan
	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK
	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah dokumen SOP penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disusun dan ditetapkan .
	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelaksanaan kegiatan Penunjang urusan Perpustakaan dan Kearsipan yang dilaksanakan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Kerja SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah triwulan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi Gaji dan Tunjangan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan administrasi dalam pelaksanaan tugas
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD per tahun
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD



Rencana Strategis

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Sambas Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Laporan Tanggapan Pemeriksaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah penyampaian Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD per tahun
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Pronosis Realisasi Anggaran
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Laporan Hasil penilaian Barang Milik Daerah SKPD per tahun
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pecis yang disediakan untuk pengadaan pakaian dinas pegawai beserta atribut kelengkapan
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang Administrasi Kepegawaiannya dilakukan pengelolaan pada SKPD
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen Laporan SKP, Evjab, Anjab



	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Sambas	Jumlah personil yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jangka waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jangka Waktu Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jangka Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jangka Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jangka Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jangka Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jangka waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Laman website/situs SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah unit Pengadaan kendaraan dinas Jabatan
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pengadaan Mebel		Jumlah paket dalam Pengadaan Mebel



Rencana Strategis

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Pengadaan aplikasi / softwear penunjang Kinerja
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah paket pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jangka waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jangka waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jangka waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jangka waktu Honorer jaasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dilakukan pemeliharaan dan perawatan serta pelunasan Pajak kendaraan bermotor



Rencana Strategis

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dilakukan pemeliharaan dan perawatan serta pelunasan Pajak kendaraan bermotor
	Pemeliharaan Mebel	Jangka waktu Pemeliharaan Pemeliharaan Mebel
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jangka waktu Pemeliharaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jangka waktu Pemeliharaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jangka waktu Pemeliharaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jangka waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



Rencana Strategis

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Kabupaten Sambas

4.3. Uraian Sub Kegiatan, beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan strategis bidang perpustakaan dan kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas merumuskan sejumlah sub kegiatan prioritas yang didasarkan pada kebutuhan pelayanan, penguatan kelembagaan, serta pengembangan literasi masyarakat. Setiap sub kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja utama, target output yang terukur, serta alokasi anggaran (pagu indikatif) yang telah direncanakan secara proporsional.

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCAME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	BASELI NE 2023	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	71,42	75,32	76,32	749.300.578,00	77,32	1.915.200.000,00	78,32	2.305.470.000	79,32	2.676.680.500	80,32	2.970.085.800	81,32	3.492.884.175	
Pengelolaan perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	0,38	0,85	0,85	613.909.857,00	1	1.468.800.000,00	1,05	1.832.055.000	1,1	2.123.083.500	1,15	2.350.807.800	1,2	2.780.545.620	
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	25	25	25	20.569.168,00	25	24.000.000,00	25	30.525.000,00	25	35.392.500,00	25	39.530.000,00	25	46.799.500,00	



Rencana Strategis

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Kabupaten Sambas

Pengembangan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah Kabupaten / Kota sesuai standar nasional perpustakaan di wilayah kabupaten/kota sesuai kewenangan	0	1	1		1	144.000.000,00	1	183.150.000,00	1	212.355.000,00	1	235.587.000,00	1	278.911.050,00	
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat daerah kabupaten / kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	1	1	1	416.715.365,00	1	672.000.000,00	1	854.700.000,00	1	990.990.000,00	1	1.099.406.000,00	1	1.301.584.900,00	
Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan kabupaten/kota	25	25	25	63.534.521,00	50	48.000.000,00	25	27.750.000,00	25	32.175.000,00	25	35.695.000,00	25	42.862.500,00	
Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	940	1569		0	1650	72.000.000,00	2150	91.575.000,00	2650	106.177.500,00	3150	117.793.500,00	3650	139.455.525,00	
Kerjasama Peningkatan kegemaran Membaca dan Literasi	jumlah kerjasama peningkatan kegemaran membaca dan literasi	2	2		0	2	24.000.000,00	2	27.750.000,00	2	29.250.000,00	2	29.500.000,00	2	31.750.000,00	
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40	40	40	58.595.091,00	2	48.000.000,00	2	61.050.000,00	2	70.785.000,00	2	78.529.000,00	2	92.970.350,00	
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah data dan informasi perpustakaan	1	1	1	8.812.625,00	1	19.200.000,00	1	24.420.000,00	1	28.314.000,00	1	31.565.000,00	1	37.369.750,00	



Rencana Strategis

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Kabupaten Sambas

Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	49,449	49,763	50,063	19.800.840,00	51,063	216.000.000,00	52,063	274.725.000,00	53,063	318.532.500,00	54,063	353.380.500,00	55,063	418.366.575,00	
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	0	0	50	0,00	60	57.600.000,00	60	73.260.000,00	60	84.942.000,00	60	94.234.800,00	60	111.564.420,00	
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK	1	1	1	25.882.247,00	1	144.000.000,00	1	183.150.000,00	1	214.170.000,00	1	235.587.000,00	1	278.911.050,00	
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasarakatan Gemar Membaca di Masyarakat	5	5	6	135.390.721	8	446.400.000	8	473.415.000	8	553.597.000	8	619.278.000	8	712.338.555	
Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	0	0			1	96.000.000,00	1	27.750.000,00	1	32.450.000,00	1	36.300.000,00	1	42.545.000,00	
Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial diwilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	1	1	1	86.902.505,00	1	134.400.000,00	1	170.940.000,00	1	199.892.000,00	1	223.608.000,00	1	260.316.980,00	
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	0			1	96.000.000,00	1	122.100.000,00	1	142.780.000,00	1	159.720.000,00	1	183.400.700,00	
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	1	1	1	10.668.031,00	1	72.000.000,00	1	91.575.000,00	1	107.085.000,00	1	119.790.000,00	1	133.105.525,00	



Rencana Strategis

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Kabupaten Sambas

Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	4	4	4	37.820.185,00	4	48.000.000,00	4	61.050.000,00	4	71.390.000,00	4	79.860.000,00	4	92.970.350,00	
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Naskah kuno yang dilestarikan	10%	10%	1	35.699.043,00	1	316.800.000	1	402.930.000	1	471.174.000	1	518.291.400	1	618.435.840	
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah kabupaten / Kota	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya			2	17.665.335,00	2	28.800.000	2	36.630.000	2	42.834.000	2	47.117.400	2	56.221.440	
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Jumlah Masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	0	0	1	9.935.907,00	1	14.400.000,00	1	18.315.000,00	1	21.417.000,00	1	23.558.700,00	1	28.110.720,00	
Pengembangan, pengolahan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah naskah kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	0	0	1	7.729.428,00	1	14.400.000,00	1	18.315.000,00	1	21.417.000,00	1	23.558.700,00	1	28.110.720,00	
Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)			20	18.033.708,00	300	288.000.000	500	366.300.000	700	428.340.000	900	471.174.000	1100	562.214.400	
Seleksi dan pengadaan koleksi budaya etnis nusantara	jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh perpustakaan daerah tingkat Kabupaten/Kota	20	50	10	8.019.200,00	150	144.000.000,00	250	183.150.000,00	350	214.170.000,00	450	235.587.000,00	550	281.107.200,00	
Pengolahan dan penyiangan koleksi budaya etnis nusantara	jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh perpustakaan daerah tingkat Kabupaten/Kota	20	50	10	10.014.508,00	150	144.000.000,00	250	183.150.000,00	350	214.170.000,00	450	235.587.000,00	550	281.107.200,00	



Rencana Strategis
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Kabupaten Sambas

PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip	45,22%	45,22%	50%	150.176.844,00	52%	368.576.522,40	54%	557.233.653,00	56%	724.655.190,54	58%	780.901.313,41	60%	842.463.990,42	
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	40	60	82	52.208.393,00	83	129.381.962,40	84	161.345.053,00	85	169.516.190,54	86	182.661.313,41	87	199.783.990,42	
	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	40	60	13		14		15		16		17		18		
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah OPD yang menyampaikan daftar Arsip dinamis.	44	44	0		9	47.572.800,00	9	72.749.500,00	9	73.950.000,00	9	74.635.000,00	9	80.960.000,00	
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah OPD yang melaksanakan pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis Inaktif	25	25	0		9	37.572.800,00	9	38.478.000,00	9	40.576.800,00	9	49.500.000,00	9	52.800.000,00	
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten	Jumlah OPD yang dilakukan pengawasan Internal Kearsipan		11	5	52.208.393,00	7	44.236.362,40	9	50.117.553,00	11	54.989.390,54	12	58.526.313,41	14	66.023.990,42	
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100	100	70	52.460.043,00	72	97.944.000,00	74	203.422.500,00	76	274.419.000,00	78	278.775.000,00	80	299.200.000,00	
Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang disampaikan kepada ANRI	50	50	0		50	41.976.000,00	50	48.097.500,00	50	50.721.000,00	50	53.625.000,00	50	54.800.000,00	
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip statis pada Organisasi perangkat daerah yang diakuisisi, dan dilakukan preservasi.	1000	1500	50	52.460.043,00	50	55.968.000,00	100	155.325.000,00	150	223.698.000,00	200	225.150.000,00	250	244.400.000,00	
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN			30	45.508.408,00	35	141.250.560,00	40	192.466.100,00	50	280.720.000,00	65	319.465.000,00	80	343.480.000,00	
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah aplikasi yang disediakan untuk penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan			1	45.508.408,00	1	43.095.360,00	1	50.380.100,00	1	70.180.000,00	1	72.600.000,00	1	77.440.000,00	



Rencana Strategis

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Kabupaten Sambas

Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan per tahun			0		50	98.155.200,00	65	142.086.000,00	100	210.540.000,00	110	246.865.000,00	110	266.040.000,00	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah Arsip yang dilakukan evakuasi, identifikasi, pemulihan dan penyimpanan akibat bencana	0	0	0	49.812.672,00	5	229.468.800,00	6	275.172.000,00	7	308.853.000,00	8	406.514.000,00	9	434.952.500,00	
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK (ITEM)				-	51	53.169.600,00	52	58.923.500,00	53	60.610.000,00	54	62.700.000,00	55	66.880.000,00	
Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Dokumen hasil penilaian dan penetapan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun			0		1	33.580.800,00	1	37.478.000,00	1	38.280.000,00	1	39.600.000,00	1	42.240.000,00	
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun			0		100	19.588.800,00	100	21.445.500,00	100	22.330.000,00	100	23.100.000,00	100	24.640.000,00	
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK				-	6	33.580.800,00	7	38.478.000,00	8	40.280.000,00	9	48.200.000,00	10	58.880.000,00	
Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dievakuasi i dan Identifikasi Akibat Bencana			0		5	16.790.400,00	6	19.239.000,00	7	20.140.000,00	8	25.100.000,00	9	29.120.000,00	
Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Arsip Akibat Bencana yang berhasil dipulihkan dan disimpan.			0		5	16.790.400,00	6	19.239.000,00	7	20.140.000,00	8	23.100.000,00	9	29.760.000,00	
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten /Kota yang Digabung dan /atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa /Kelurahan	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK				-	10	64.363.200,00	15	73.749.500,00	20	78.330.000,00	25	137.264.000,00	30	145.792.500,00	



Rencana Strategis

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Kabupaten Sambas

Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten /Kota	Dokumen Data Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota karena Penggabungan.			0		5	19.588.800,00	5	22.445.500,00	5	23.330.000,00	5	43.190.000,00	5	45.880.000,00	
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten /Kota	Dokumen Data Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota karena Pembubaran			0		5	16.790.400,00	5	18.239.000,00	5	19.140.000,00	5	45.190.000,00	5	45.760.000,00	
Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Dokumen Data Arsip Kecamatan yang dimekarkan			0		1	13.992.000,00	1	16.032.500,00	1	16.530.000,00	1	17.847.500,00	1	20.632.500,00	
Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Dokumen Data Arsip Desa yang dimekarkan			0		1	13.992.000,00	1	17.032.500,00	1	19.330.000,00	1	31.036.500,00	1	33.520.000,00	
Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten yang sesuai NSPK			77	49.812.672,00	77,5	27.984.000,00	78	44.891.000,00	78,5	47.328.000,00	79	65.340.000,00	79,5	67.360.000,00	
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Dokumen Daftar Arsip Statis Otentik berdasarkan penilaian dan penetapan autentisitas			0		1	13.992.000,00	1	22.445.500,00	1	23.664.000,00	1	32.670.000,00	1	33.680.000,00	
Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Daftar Arsip hasil alihmedia berdasarkan penilaian dan penetapan.			1	49.812.672,00	1	13.992.000,00	1	22.445.500,00	1	23.664.000,00	1	32.670.000,00	1	33.680.000,00	
Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK				-	1	50.371.200,00	1	59.130.000,00	1	82.305.000,00	1	93.010.000,00	1	96.040.000,00	



Rencana Strategis

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Kabupaten Sambas

Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Dokumen penilaian dan penetapan arsip statis yang hilang			0	0	1	13.992.000,00	1	17.445.500,00	1	23.895.000,00	1	27.670.000,00	1	28.680.000,00	
Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Dokumen Evaluasi dan penetapan hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang			0		1	19.588.800,00	1	22.445.500,00	1	29.205.000,00	1	32.670.000,00	1	33.680.000,00	
Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Dokumen Penetapan dan pengumuman Daftar Pencarian Arsip.			0		1	16.790.400,00	1	19.239.000,00	1	29.205.000,00	1	32.670.000,00	1	33.680.000,00	
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah SOP Penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disusun dan ditetapkan					1	26.790.400,00	1	30.239.000,00	1	32.470.000,00	1	43.700.000,00	1	46.680.000,00	
Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/ Kota yang sesuai NSPK					1	26.790.400,00	1	30.239.000,00	1	32.470.000,00	1	43.700.000,00	1	46.680.000,00	
Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah dokumen SOP penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disusun dan ditetapkan .					1	16.790.400,00	1	19.239.000,00	1	19.470.000,00	1	29.700.000,00	1	31.680.000,00	
Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup					1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	13.000.000,00	1	14.000.000,00	1	15.000.000,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelaksanaan kegiatan Penunjang urusan Perpustakaan dan Kearsipan yang dilaksanakan	100	100	100	4.271.349.025,00	100	4.188.094.116,65	100	5.235.117.645,81	100	6.177.438.822,06	100	6.918.731.580,70	100	7.948.541.202,81	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	58.207.915,00	100	36.807.022,15	100	45.807.022,15	100	61.017.617,11	100	87.379.731,16	100	93.486.690,83	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Kerja SKPD	1	1	1	14.748.125,00	1	5.635.522,15	1	7.635.522,15	1	11.369.916,14	1	12.734.306,08	1	13.644.451,99	

BAB IV Program dan Kegiatan



Rencana Strategis
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Kabupaten Sambas

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD	1	1	1	14.287.290,00	1	5.999.000,00	1	5.999.000,00	1	12.978.820,00	1	14.536.278,40	1	15.716.720,16	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	1	1	4.329.765,00	1	5.329.765,00	1	7.329.765,00	1	8.649.122,70	1	9.687.017,42	1	10.140.070,03	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD	1	1	1	6.275.570,00	1	6.275.570,00	1	7.275.570,00	1	8.130.503,67	1	11.346.164,11	1	12.048.088,73	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA SKPD	1	1	1	4.339.770,00	1	4.339.770,00	1	5.339.770,00	1	6.020.928,60	1	12.343.440,03	1	13.194.956,03	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	1	3.752.000,00	1	3.752.000,00	1	5.752.000,00	1	6.687.360,00	1	14.209.843,20	1	15.341.319,68	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah triwulan	4	4	4	10.475.395,00	4	5.475.395,00	4	6.475.395,00	4	7.180.966,00	4	12.522.681,92	4	13.401.084,21	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	2.583.624.194,00	100	2.972.370.728,50	100	3.686.837.860,88	100	4.336.302.333,66	100	4.868.378.713,69	100	5.580.085.405,75	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi Gaji dan Tunjangan	22	22	21	2.413.120.529,00	21	2.814.867.063,50	21	3.518.583.829,38	21	4.151.928.918,66	21	4.650.160.488,90	21	5.347.684.447,24	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan administrasi dalam pelaksanaan tugas	22	22	21	10.299.740,00	21	5.299.740,00	21	6.829.714,00	21	7.829.714,00	21	8.649.279,68	21	9.796.671,63	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD per tahun	12	12	12	128.760.000,00	12	128.760.000,00	12	131.636.000,00	12	141.636.000,00	12	158.632.320,00	12	162.427.168,00	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	12	12	9.616.400,00	12	4.616.400,00	12	5.078.040,00	12	6.078.040,00	12	10.767.404,80	12	12.132.515,52	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	6.194.275,00	1	5.194.275,00	1	6.713.702,50	1	7.713.702,50	1	9.239.346,80	1	11.375.248,82	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Laporan Tanggapan Pemeriksaan	1	1	1	9.098.650,00	1	5.098.650,00	1	6.608.515,00	1	7.518.047,70	1	10.020.213,42	1	12.123.245,43	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah penyampaian Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD per tahun	4	4	4	3.502.900,00	4	5.502.900,00	4	6.053.190,00	4	6.862.764,20	4	13.286.295,90	4	15.279.240,29	



Rencana Strategis
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Kabupaten Sambas

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Pronosis Realisasi Anggaran	1	1	1	3.031.700,00	1	3.031.700,00	1	5.334.870,00	1	6.735.146,60	1	7.623.364,19	1	9.266.868,82	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100	100	100	21.994.175,00	100	21.994.175,00	100	27.196.820,50	100	30.632.247,81	100	39.908.117,55	100	45.894.335,17	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1	3.547.410,00	1	3.547.410,00	1	5.902.151,00	1	6.144.538,00	1	9.121.882,56	1	10.490.164,94	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Laporan Hasil penilaian Barang Milik Daerah SKPD per tahun	1	1	1	6.930.900,00	1	6.930.900,00	1	7.623.990,00	1	8.176.308,00	1	11.397.464,96	1	13.107.084,70	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	1	7.439.240,00	1	7.439.240,00	1	8.186.392,00	1	9.839.942,56	1	12.140.735,67	1	13.961.846,02	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	1	4.076.625,00	1	4.076.625,00	1	5.484.287,50	1	6.471.459,25	1	7.248.034,36	1	8.335.239,51	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	87.364.700,00	100	41.584.700,00	100	46.848.280,00	100	50.060.970,00	100	70.628.286,40	100	81.222.529,36	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pecis yang disediakan untuk pengadaan pakaian dinas pegawai beserta atribut kelengkapan		34		28.000.000,00	32	17.000.000,00	32	18.700.000,00	32	19.066.000,00	32	24.713.920,00	32	28.421.008,00	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang Administrasi Kepegawaiannya dilakukan pengelolaan pada SKPD	22	22	22	18.944.900,00	21	8.944.900,00	21	9.944.900,00	21	10.274.982,00	21	17.107.979,84	31	19.674.176,82	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen Laporan SKP, Evjab, Anjab	3	3	3	14.833.800,00	3	4.833.800,00	3	6.317.380,00	3	7.994.508,00	3	12.313.848,96	3	14.160.926,30	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah personil yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	2	2		25.586.000,00	2	10.806.000,00	2	11.886.000,00	2	12.725.480,00	2	16.492.537,60	2	18.966.418,24	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Tersedianya Laporan Administrasi	100	100	100	357.139.370,00	100	191.602.423,00	100	234.934.088,08	100	263.921.638,50	100	284.612.235,12	100	306.454.070,40	



Rencana Strategis

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Kabupaten Sambas

	Umum Perangkat Daerah															
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12	12	12	21.122.305,00	12	23.366.915,00	12	25.273.966,60	12	26.363.280,00	12	28.366.873,60	12	32.971.904,64	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jangka Waktu Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	12	70.000.000,00	12	10.000.000,00	12	11.447.693,68	12	12.447.693,69	12	13.281.416,93	12	14.123.629,47	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jangka Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	12	12	13.747.925,00	12	11.397.940,00	12	13.791.503,00	12	14.273.973,55	12	15.226.850,38	12	17.960.877,94	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jangka Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	12	12	5.171.340,00	12	5.171.340,00	12	6.688.474,00	12	7.712.399,32	12	8.637.887,24	12	9.933.570,33	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jangka Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	12	12	20.030.800,00	12	20.599.228,00	12	24.964.750,80	12	25.458.405,94	12	27.713.414,65	12	30.670.426,85	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jangka Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	12	12	5.400.000,00	12	5.400.000,00	12	6.534.000,00	12	9.710.120,00	12	10.875.334,40	12	12.506.634,56	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	171.667.000,00	12	95.667.000,00	12	116.233.700,00	12	132.155.766,00	12	140.214.457,92	12	143.096.626,61	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laman website/situs SKPD	12	12	12	50.000.000,00	12	20.000.000,00	12	30.000.000,00	12	35.800.000,00	12	40.296.000,00	12	45.190.400,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-		-	100	99.000.000,00	100	95.000.000,00	100	80.000.000,00	100	220.000.000,00	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Pengadaan kendaraan dinas Jabatan						-		-	1	35.000.000,00					
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						-	1	35.000.000,00		-	1	40.000.000,00			
Pengadaan Mebel	Jumlah paket dalam Pengadaan Mebel						-	1	25.000.000,00			1	20.000.000,00			



Rencana Strategis

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Kabupaten Sambas

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						-	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00			
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Pengadaan aplikasi / software penunjang Kinerja						-		-	1	25.000.000,00					
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						-		-					1	220.000.000,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						-	1	19.000.000,00							
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						-		-	1	15.000.000,00					
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	528.168.671,00	100%	517.496.068,00	100%	627.170.674,20	100%	748.061.395,56	100%	817.868.763,03	100%	910.549.077,49	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	43.038.475,00	12	32.365.872,00	12	40.163.159,20	12	58.392.527,86	12	65.399.631,20	12	72.209.575,88	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	12	226.813.300,00	12	226.813.300,00	12	274.443.730,00	12	323.843.601,40	12	342.744.833,57	12	417.156.558,61	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jangka waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu Honorer jaasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	12	258.316.896,00	12	258.316.896,00	12	312.563.785,00	12	365.825.266,30	12	409.724.298,26	12	421.182.943,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	634.850.000,00	100%	406.239.000,00	100%	467.322.900,00	100%	592.442.619,42	100%	669.955.733,75	100%	710.849.093,81	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dilakukan pemeliharaan dan perawatan serta pelunasan Pajak kendaraan bermotor	1	1	1	130.000.000,00	1	86.000.000,00	1	104.060.000,00	1	122.790.800,00	1	137.525.696,00	1	147.154.550,40	



Rencana Strategis

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Kabupaten Sambas

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dilakukan pemeliharaan dan perawatan serta pelunasan Pajak kendaraan bermotor	2	2	2	142.250.000,00	2	55.250.000,00	2	66.775.000,00	2	85.794.500,00	2	100.089.840,00	2	110.503.316,00	
Pemeliharaan Mebel	Jangka waktu Pemeliharaan Pemeliharaan Mebel					12	10.000.000,00	12		12	14.000.000,00	12	16.000.000,00	12	17.000.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jangka waktu Pemeliharaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	12	12	114.450.000,00	12	54.450.000,00	12	65.895.000,00	12	77.756.799,42	12	87.587.615,35	12	95.725.757,65	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jangka waktu Pemeliharaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	12	12	202.500.000,00	12	140.690.000,00	12	154.759.000,00	12	206.215.620,00	12	230.961.494,40	12	235.605.718,56	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jangka waktu Pemeliharaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	24.000.000,00	12	26.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jangka waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	12	12	45.650.000,00	12	39.849.000,00	12	55.833.900,00	12	65.884.900,00	12	73.791.088,00	12	78.859.751,20	
TOTAL					5.256.338.162,00		7.044.929.839,05		8.806.162.298,81		10.391.271.512,60		11.638.224.094,11		13.383.957.708,23	

4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam mendukung program prioritas Daerah/Pusat

Pelaksanaan sub kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas tahun 2025 disusun secara strategis untuk mendukung pencapaian program prioritas Pemerintah Kabupaten Sambas serta sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, khususnya dalam penguatan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, dan pelestarian budaya.

4.4.1. Mendukung Prioritas Daerah



Sub kegiatan yang dirancang secara langsung berkontribusi terhadap prioritas pembangunan daerah, antara lain:

- a. **Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** melalui sub kegiatan *Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar, Pengembangan Layanan Rujukan, dan Pembudayaan Gemar Membaca*, yang bertujuan menciptakan masyarakat yang literat, kreatif, dan produktif.
- b. **Penguatan Tata Kelola Pemerintahan** diwujudkan melalui sub kegiatan *Pengelolaan Arsip Dinamis, Penyusunan Dokumen Perencanaan, dan Administrasi Keuangan*, yang menjadi tulang punggung akuntabilitas birokrasi. **Pelestarian Budaya Lokal**, tercermin dari kegiatan *Pelestarian Naskah Kuno dan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara*, sebagai bentuk komitmen melestarikan identitas dan sejarah lokal.

4.4.2. Mendukung Program Prioritas Nasional

Sub kegiatan yang dilaksanakan juga mendukung agenda prioritas nasional, khususnya:

- Penguatan Literasi Nasional**, selaras dengan Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Gerakan Literasi Nasional, melalui sub kegiatan *Pengelolaan Perpustakaan Daerah, Pemanfaatan Koleksi Digital, dan Pengembangan Perpustakaan Inklusif*.
- a. **Reformasi Birokrasi dan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)**, melalui kegiatan digitalisasi arsip, *Pengelolaan Simpul Jaringan Kearsipan Nasional*, serta *Penyediaan Layanan Kearsipan berbasis TIK*, yang mendukung transformasi layanan publik menjadi efisien dan transparan.
 - b. **Penguatan Ketahanan Budaya dan Karakter Bangsa**, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN, melalui pelestarian naskah kuno dan pembentukan *Duta Baca Daerah*, yang mendorong peran aktif masyarakat dalam mencintai literatur lokal.

3. Integrasi Perencanaan dan Penganggaran



Rencana Strategis

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Kabupaten Sambas

Seluruh sub kegiatan telah disusun berdasarkan pendekatan *money follow program* dan *money follow function*, dengan dukungan indikator kinerja yang terukur serta alokasi pagu yang disesuaikan. Perencanaan ini dirancang untuk memudahkan integrasi ke dalam sistem perencanaan daerah (SIPD) dan mendukung pelaksanaan reformasi perencanaan nasional.

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
23	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
							2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat
					2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
							2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
		2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	02:24:02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
							2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
				Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif	2.24.02.2.03.0001		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	



Rencana Strategis
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Kabupaten Sambas

				Bangsa				
--	--	--	--	--------	--	--	--	--



4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra (IKU)

Untuk menjamin tercapainya visi dan misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas dalam mewujudkan layanan perpustakaan dan kearsipan yang unggul, adaptif, dan berkelanjutan, telah ditetapkan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** sebagai alat ukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2025–2030.

Indikator-indikator ini dipilih secara selektif, berbasis hasil, dan mencerminkan kontribusi nyata OPD terhadap pembangunan daerah dan nasional. Masing-masing IKU ditetapkan dengan target tahunan (baseline, target kinerja, dan pagu anggaran) yang terukur, realistis, dan konsisten dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sambas serta RPJMN Nasional.

Kategori OPD	Outcome	Indikator Sasaran RPJMD BISA MENJADI Indikator Tujuan OPD dan IKU KEPALA OPD	Baseline 2023	Baseline 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	12	13								
Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan melalui Budaya Literasi Masyarakat	Peningkatan kualitas dan kuantitas literasi Masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat		74,25	75,25	76,25	77,25	78,25	79,25	80,25



Rencana Strategis

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Kabupaten Sambas

	Peningkatan Manajemen Kearsipan	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah		71,32	75	78	80	82	85	87
--	---------------------------------------	--	--	-------	----	----	----	----	----	----



4.6. Taget Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Khusus (IKK)

Indikator Kinerja Khusus / Indikator Program bisa dijabarkan sebagai berikut :

Bidang Perpustakaan

1. **.NilaiTingkat Kegemaran Membaca Masyarakat**

Pada tahun dasar 2024, nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat tercatat sebesar **75,32**. Target peningkatan dilakukan secara bertahap setiap tahun, yaitu 76,32 (2025), 77,32 (2026), 78,32 (2027), 79,32 (2028), 80,32 (2029), hingga mencapai **81,32** pada tahun 2030. Peningkatan ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam mendorong literasi dan minat baca masyarakat.

2. **Jumlah Koleksi Naskah Kuno yang Dimiliki Perpustakaan Daerah**

Pada tahun dasar 2024, jumlah koleksi naskah kuno masih **0 eksemplar**. Mulai 2025 ditargetkan memiliki **1 eksemplar** dan jumlah tersebut dipertahankan hingga tahun 2030. Hal ini menunjukkan fokus pada pelestarian warisan budaya dan sejarah melalui pengumpulan naskah kuno.

Bidang Kearsipan

1. **Tingkat Ketersediaan Arsip**

Tahun dasar 2024 tingkat ketersediaan arsip tercatat **49,57%**. Target peningkatan dilakukan bertahap, mulai 50% (2025), 52% (2026), 54% (2027), 56% (2028), 58% (2029), hingga **60%** pada 2030. Peningkatan ini bertujuan memastikan arsip yang dibutuhkan tersedia secara memadai untuk kepentingan administrasi dan pelayanan publik.

2. **Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan, dan Penyimpanan Akibat Bencana**

Tahun dasar 2024 belum ada arsip yang ditangani akibat bencana. Mulai tahun 2025 ditargetkan ada penanganan



terhadap **5 arsip**, kemudian meningkat setiap tahun hingga mencapai **9 arsip** pada 2030. Hal ini menggambarkan upaya antisipasi dan pemulihan arsip dari risiko bencana.

3. Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan

Tahun dasar 2024 belum tersedia SOP. Mulai 2025 ditargetkan penyusunan **1 SOP** dan jumlah ini dipertahankan hingga 2030. Langkah ini menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan arsip secara tertib dan sesuai ketentuan.

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.23	PERPUSTAKAAN								
	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	75,32	76,32	77,32	78,32	79,32	80,32	81,32
	Jumlah Koleksi Naskah Kuno Yang Dimiliki Perpustakaan Daerah	Eksemplar	0	1	1	1	1	1	1
2.24	KEARSIPAN								
	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	49,57	50%	52%	54%	56%	58,00%	60%
	Jumlah Arsip yang dilakukan evakuasi, identifikasi, pemulihan dan penyimpanan akibat bencana	Arsip	0	5	5	6	7	8	9
	Jumlah SOP Penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disusun dan ditetapkan	SOP	0	1	1	1	1	1	1



Rencana Strategis

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Kabupaten Sambas



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 – 2029, merupakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029. Renstra ini memuat arah Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan sesuai dengan Urusan, Tugas Pokok dan Fungsi dalam mendukung Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sambas.

Dalam upaya untuk mewujudkan keberhasilan suatu program dan kegiatan perlu dilaksanakan proses Perencanaan yang disusun dengan baik dan benar, serta dilaksanakan secara efektif dan efisien. Rencana Strategis ini selanjutnya menjadi :

- a. Pedoman bagi seluruh unit kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas dalam menyusun rencana target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025-2029;
- b. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) unit kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas tahun 2025-2029;
- c. Pedoman dan tolok ukur capaian Kinerja pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

Apabila seiring dengan dinamika pembangunan dimasa yang akan datang diperlukan akselerasi terhadap Program dan kegiatan yang telah ada, maka tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan perubahan dan penambahan maupun penyempurnaan terhadap program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi yang ada serta dalam koridor tatalaksana administrasi pemerintahan yang baik.

Sambas, Februari 2026



Rencana Strategis
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Kabupaten Sambas